

## PENDIDIKAN POLITIK INKLUSIF SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN LITERASI DEMOKRASI PADA KOMUNITAS NELAYAN

Muh. Fichriyadi Hastira<sup>1\*</sup>, Sry Reski Mulka<sup>2</sup>, M. Aviv Adhitya Putra Pratama<sup>3</sup>, Dea Rizky Amalia<sup>4</sup>, Rahmat Hidayat<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Samarinda

<sup>5</sup>Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka

Email: [1muhfichriyadihastira@fisip.unmul.ac.id](mailto:1muhfichriyadihastira@fisip.unmul.ac.id), [2sryreskimulka@fisip.unmul.ac.id](mailto:2sryreskimulka@fisip.unmul.ac.id)  
[3avivadhityaputrapratama@fisip.unmul.ac.id](mailto:3avivadhityaputrapratama@fisip.unmul.ac.id) [4dearizkyamalia@fisip.unmul.ac.id](mailto:4dearizkyamalia@fisip.unmul.ac.id)  
[5rahmataufklarung09@gmail.com](mailto:5rahmataufklarung09@gmail.com)

### ABSTRACT

*This community service program was implemented in Rawa Makmur Subdistrict, Samarinda City, with the aim of enhancing political literacy and democratic participation among fishing communities. The activities were designed using a participatory approach, employing interactive lectures, group discussions, and evaluation through pre-test and post-test assessments. A total of 50 participants took part in the program, representing five fishermen groups. The training materials focused on democratic principles, the functions of elections, and forms of citizen political participation. Pre-test results indicated that although the majority of participants had a basic understanding of democracy, inaccuracies were still found in responses related to the requirements for valid elections and the functions of political participation. Following the training, post-test results demonstrated a significant improvement, with all participants understanding the core principles of democracy and the functions of elections, and 98% of participants correctly answering questions regarding democratic characteristics, electoral periods, and the legal requirements of elections. These findings indicate that inclusive political education using a participatory approach is effective in improving political literacy among coastal communities. The program not only strengthened procedural understanding of democracy but also fostered substantive awareness of the importance of citizen engagement in local-level public decision-making.*

**Keywords:** *Political Literac, Coastal Communities, Democratic Participation, Electoral Education*

### ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Rawa Makmur, Kota Samarinda, dengan tujuan meningkatkan literasi politik dan partisipasi demokratis komunitas nelayan. Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta evaluasi berbasis pre-test dan post-test. Peserta kegiatan berjumlah 50

orang yang merupakan perwakilan dari lima kelompok nelayan. Materi pelatihan difokuskan pada prinsip demokrasi, fungsi pemilu, serta bentuk partisipasi politik warga. Hasil pre-test menunjukkan bahwa meskipun mayoritas peserta memahami dasar demokrasi, masih ditemukan kesalahan dalam menjawab pertanyaan mengenai syarat sah pemilu dan fungsi partisipasi. Setelah pelatihan, hasil post-test memperlihatkan peningkatan signifikan, di mana seluruh peserta memahami prinsip utama demokrasi dan fungsi pemilu, serta 98% peserta mampu menjawab benar mengenai ciri demokrasi, periode pemilu, dan syarat sahnya pemilu. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik inklusif dengan pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan literasi politik warga pesisir. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman demokrasi secara prosedural, tetapi juga mendorong kesadaran substantif akan pentingnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Literasi Politik, Komunitas Pesisir, Partisipasi Demokratis, Pendidikan Pemilu

## PENDAHULUAN

Partisipasi politik masyarakat merupakan tolok ukur utama keberhasilan demokrasi karena melalui partisipasi rakyatlah legitimasi pemerintahan diperoleh serta keadilan prosedural maupun substantif dapat ditegakkan. Studi Pemilu 2024 di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih mencapai 81,97%, angka yang relatif tinggi, meski masih diwarnai kendala seperti kerumitan prosedur pemilu dan rendahnya kesadaran politik sebagian pemilih. Partisipasi yang tinggi tidak hanya berarti warga menggunakan hak pilihnya, tetapi juga mencerminkan pemahaman terhadap proses politik, kemampuan memengaruhi kebijakan, serta keterlibatan dalam mekanisme politik baik di tingkat lokal maupun nasional (Mappakalu, 2015).

Realitas di komunitas akar rumput, termasuk kelompok marginal seperti penyandang disabilitas dan masyarakat pesisir, menunjukkan literasi politik yang masih rendah. Studi di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, misalnya, menemukan bahwa lemahnya pemahaman tentang proses politik dan hak warga negara secara signifikan menurunkan minat serta kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu (Wahyuningroem, 2021). Hambatan yang muncul di antaranya adalah keterbatasan akses informasi, kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu, serta kondisi sosial ekonomi yang membuat masyarakat lebih fokus pada kebutuhan harian dibanding keterlibatan politik. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan politik untuk memperkuat demokrasi substantif yang melibatkan seluruh warga negara tanpa terkecuali (Fahmi Widiyanto, 2024).

Di Indonesia, kelompok masyarakat nelayan masih kerap tersisih dari proses politik formal. Penelitian di Desa Pulo Madu, Kabupaten Kepulauan Selayar, menunjukkan bahwa meskipun masyarakat nelayan ikut dalam Pemilu, partisipasi mereka seringkali bersifat pasif dan lebih dipengaruhi faktor eksternal, seperti imbalan finansial atau harapan perubahan ekonomi, dibandingkan kesadaran politik (Hasimu & Amsir, 2020). Temuan lain di Permukiman Lamnga,

Kabupaten Aceh Besar, menegaskan bahwa faktor isolasi geografis, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterasingan sosial-politik turut membentuk budaya politik yang pasif di kalangan nelayan (Andyanto et al., 2023). Secara nasional, tingkat partisipasi Pemilu 2024 mencapai 81,78%, sedikit menurun dibanding 2019, meski masih melampaui target RPJMN sebesar 79,5% (Antaraneews, 2024).

Minimnya pendidikan politik di komunitas pesisir berimplikasi pada rendahnya kualitas partisipasi publik dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Penelitian di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Maluku Utara, menemukan bahwa sosialisasi calon kepala daerah masih sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak mendapat informasi memadai untuk menentukan pilihan rasional (Wahyuningroem, 2021). Dampak lebih lanjut dari kondisi ini adalah munculnya sikap apatis, lemahnya kontrol terhadap penyelenggara publik, dan terbatasnya pengajuan aspirasi melalui jalur resmi. Hal tersebut menimbulkan risiko ketimpangan representasi, karena hanya kelompok yang terorganisir yang mampu memperjuangkan kepentingannya dalam kebijakan publik.

Kondisi serupa juga terlihat di Kelurahan Rawa Makmur, khususnya di komunitas Kampung Nelayan Maju. Sebagian besar warga menggantungkan hidup pada sektor perikanan dengan tingkat pendidikan rata-rata hanya tamatan SD–SMP. Kerentanan ekonomi akibat fluktuasi harga ikan, kerusakan sarana tangkap, dan perubahan lingkungan Sungai Mahakam membuat partisipasi politik sering kali bukan menjadi prioritas utama. Studi lokal mengenai pemanfaatan fasilitas perikanan di Samarinda memperlihatkan bahwa meskipun nelayan terlibat dalam aktivitas ekonomi kolektif, partisipasi mereka dalam forum publik seperti konsultasi kebijakan masih terbatas (Agustani, 2024).

Tingkat partisipasi politik masyarakat nelayan di Samarinda juga cenderung rendah, terutama pada kelompok berpendidikan dan berpendapatan rendah. Upaya administratif seperti percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula memang sudah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya menjawab tantangan literasi politik (Mulka et al., 2025). Padahal, kelompok nelayan memiliki potensi strategis sebagai basis demokrasi lokal jika diberdayakan melalui pendidikan politik inklusif. Dengan literasi politik yang lebih baik, mereka dapat mengajukan aspirasi, mengawasi kebijakan perikanan, serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan lokal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat pesisir.

Untuk menjawab persoalan tersebut, dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk *“Pendidikan Politik Inklusif bagi Komunitas Kampung Nelayan Maju untuk Meningkatkan Partisipasi Demokratis di Kelurahan Rawa Makmur Kota Samarinda.”* Kegiatan ini menggunakan metode penyuluhan, diskusi kelompok terarah (FGD), dan simulasi partisipasi politik dengan pendekatan partisipatif. Harapannya, kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi demokratis masyarakat pesisir. Sejalan dengan pandangan KPU RI (2023), pendidikan politik berbasis komunitas dapat meningkatkan partisipasi pemilih

hingga 10–15% di wilayah dengan literasi rendah. Signifikansi kegiatan ini tidak hanya pada peningkatan kesadaran politik nelayan, tetapi juga dalam memperkuat demokrasi lokal yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pendidikan Politik Inklusif bagi Komunitas Kampung Nelayan Maju untuk Meningkatkan Partisipasi Demokratis di Kelurahan Rawa Makmur Kota Samarinda” dilaksanakan pada tahun 2024 dengan waktu pelaksanaan puncak pengabdian berupa sosialisasi di hari Jumat, 11 September 2025, bertempat di aula Kampung Nelayan Kelurahan Rawa Makmur, Kota Samarinda. Waktu pelaksanaan berlangsung sejak pukul 08.00 WITA hingga 11.30 WITA dengan total durasi 3,5 jam. Peserta yang terlibat berjumlah 50 orang yang merupakan perwakilan dari lima kelompok nelayan yang berdomisili di Kelurahan Rawa Makmur. Pemilihan lokasi dan sasaran peserta dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi komunitas pesisir yang rentan terhadap keterpinggiran politik, serta rendahnya tingkat literasi politik masyarakat nelayan.

Secara metodologis, kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi kelompok. Metode ini dipilih karena dianggap relevan untuk meningkatkan pemahaman konseptual peserta mengenai demokrasi dan partisipasi politik, sekaligus memberikan ruang partisipasi aktif bagi warga nelayan dalam menyampaikan pengalaman, pandangan, dan tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan politik sehari-hari. Pendekatan partisipatif juga bertujuan menciptakan interaksi dua arah antara pemateri dan peserta, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih inklusif dan dialogis.

Kegiatan dimulai dengan sesi pembukaan yang dipandu oleh moderator, diawali penyampaian sepatah kata dari Ketua Tim Program Pengabdian, Sry Reski Mulka, S.IP., M.I.Pol. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai sarana peningkatan kapasitas masyarakat nelayan agar lebih sadar terhadap hak dan kewajiban politik mereka. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kelurahan Rawa Makmur, Idiansyah, S.H., yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif pengabdian ini dan menegaskan komitmen pemerintah kelurahan dalam mendukung peningkatan partisipasi demokratis di wilayahnya.

Setelah sesi pembukaan, kegiatan inti berupa penyampaian materi dilaksanakan dengan menghadirkan dua pemateri utama. Pemateri pertama, Muh. Fichriyadi Hastira, S.IP., M.Si., membawakan materi berjudul “Demokrasi dan Pemilu” yang menekankan pada konsep dasar demokrasi, mekanisme penyelenggaraan pemilu, pentingnya suara rakyat dalam legitimasi pemerintahan, serta tantangan praktik demokrasi di Indonesia. Materi ini disusun untuk memberikan pemahaman mendasar kepada peserta terkait sistem politik nasional, khususnya mengenai peran pemilu sebagai instrumen utama partisipasi rakyat.

Sesi kedua dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Rahmat Hidayat, S.IP., M.Si., yang mengangkat tema “Partisipasi Politik”. Materi ini membahas berbagai bentuk partisipasi politik, mulai dari penggunaan hak pilih, keterlibatan dalam musyawarah pembangunan, hingga pengawasan terhadap kebijakan publik di tingkat lokal. Pemateri juga menekankan pada pentingnya keaktifan masyarakat pesisir dalam mengartikulasikan kepentingan mereka, sehingga kebijakan publik dapat lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok nelayan. Metode ceramah yang digunakan tidak bersifat satu arah semata, melainkan dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan diskusi terbuka yang memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun kendala partisipasi politik yang mereka alami..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat pesisir di Kelurahan Rawa Makmur memiliki peranan yang strategis dalam kehidupan demokrasi lokal di Kota Samarinda. Berdasarkan data monografi kelurahan, Rawa Makmur mempunyai jumlah penduduk sekitar 23.846 jiwa, dengan tipologi kelurahan mencakup kegiatan sektor perikanan, sehingga nelayan termasuk kelompok produktif substansial dalam komunitas tersebut (Admin, 2025).

Data lainnya menyebutkan bahwa terdapat 44 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan yang terdata di Kota Samarinda yang tersebar pula di Rawa Makmur, dengan jumlah total nelayan kira-kira 778 orang, termasuk nelayan daratan dan laut (Admin, 2024). Kondisi infrastruktur pun menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap komunitas pesisir melalui proyek Penataan Kampung Nelayan Maju (Kalaju), antara lain pembangunan fasilitas publik seperti jembatan tambat perahu, drainase, serta papan ikon kampung nelayan yang menunjukkan bahwa komunitas nelayan di Rawa Makmur diakui sebagai bagian dari wacana pembangunan kota (Novriandi, 2023).



**Gambar 1. Pemukiman Kampung Nelayan Rawa Makmur**

Meski demikian, faktor literasi politik masih menjadi tantangan nyata di komunitas pesisir ini. Walau infrastruktur fisik telah diperbaiki dan kebutuhan dasar seperti akses penangkapan ikan telah mendapatkan dukungan, belum banyak bukti bahwa masyarakat nelayan di Rawa Makmur memahami secara mendalam hak dan kewajiban politik mereka, berikut mekanisme Pemilu serta konsep demokrasi yang lebih luas. Minimnya sosialisasi politik lokal dan akses informasi politik yang memadai menjadi hambatan utama. Relevansi kegiatan pengabdian ini muncul dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan pemahaman politik tersebut kegiatan pendidikan politik inklusif yang dilakukan bertujuan tidak hanya mentransfer materi tentang demokrasi dan pemilu, tetapi juga memberikan ruang dialog, klarifikasi miskonsepsi, dan membangun kesadaran partisipatif agar warga pesisir bisa lebih aktif dalam proses demokrasi lokal.

Tingkat pemahaman awal masyarakat pesisir di Kelurahan Rawa Makmur terkait demokrasi dan pemilu menunjukkan kecenderungan yang masih rendah. Berdasarkan hasil diskusi kelompok dengan para nelayan, mayoritas peserta memaknai demokrasi sebatas proses pemilihan umum, yang dalam praktiknya dipahami hanya sebagai kegiatan memilih calon legislatif atau kepala daerah, tanpa mengaitkannya dengan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kebebasan sipil yang lebih luas. Miskonsepsi ini umum terjadi di wilayah pesisir, di mana keterbatasan pendidikan formal dan akses informasi politik turut berpengaruh.

**Tabel 2. Angka Partisipasi Pemilih di Kota Samarinda**

<b>Jenis dan Tahun Pemilihan</b>	<b>Angka Tingkat Partisipasi</b>
<b>Pemilu 2019</b>	<b>72,20%</b>
<b>Pilkada 2020</b>	<b>51,8%</b>
<b>Pemilu 2024</b>	<b>58,8%</b>

*Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai data (2025)*

Dalam konteks penelitian ini, data tingkat partisipasi pemilih yang disajikan pada Tabel 2 merupakan data agregat tingkat Kota Samarinda yang dihimpun dari berbagai sumber resmi, seperti laporan Komisi Pemilihan Umum dan publikasi statistik daerah. Hingga saat ini, data partisipasi pemilih yang terdisagregasi secara spesifik hingga tingkat kelurahan, termasuk Kelurahan Rawa Makmur, masih relatif terbatas dan belum dipublikasikan secara sistematis oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, angka partisipasi tersebut digunakan sebagai indikator pembandingan (baseline) untuk memahami kecenderungan umum partisipasi politik masyarakat di wilayah kota.

Meskipun demikian, temuan lapangan melalui diskusi kelompok dengan komunitas nelayan di Kelurahan Rawa Makmur menunjukkan indikasi bahwa tingkat partisipasi politik kelompok ini berpotensi berbeda dari rata-rata kota. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pesisir, pola kerja nelayan yang sangat bergantung pada kondisi alam, serta keterbatasan akses terhadap informasi politik dan layanan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penggunaan data agregat kota dalam penelitian ini dipadukan

dengan data kualitatif dari observasi dan diskusi lapangan untuk memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai partisipasi politik masyarakat nelayan.

Data BPS Kota Samarinda (2024) menunjukkan bahwa sekitar 42% masyarakat di kawasan pesisir Samarinda hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang SMP, yang berdampak pada keterbatasan literasi politik. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi hambatan karena sebagian besar nelayan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan harian dibandingkan mengikuti perkembangan politik, sejalan dengan temuan Yusri (2021) yang menekankan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi dan pemahaman politik. Rendahnya akses informasi politik yang relevan, baik melalui media maupun forum diskusi, turut memperkuat keterbatasan pemahaman masyarakat pesisir tentang demokrasi sebagai sebuah sistem yang komprehensif.

Respon peserta terhadap materi pertama yang disampaikan oleh Muh. Fichriyadi Hastira, S.IP., M.Si mengenai “Demokrasi dan Pemilu” menunjukkan adanya antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat nelayan di Kelurahan Rawa Makmur. Peserta mulai memahami kembali konsep dasar hak dan kewajiban warga negara, terutama hak politik untuk memilih dan dipilih serta kewajiban untuk menjaga keberlangsungan demokrasi melalui partisipasi aktif. Penjelasan tentang prinsip-prinsip demokrasi substantif, seperti akuntabilitas, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, membuka ruang diskusi kritis di mana beberapa peserta menyinggung persoalan keterbatasan transparansi dalam pelaksanaan pemilu di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian Wahyuningroem (2021) yang menegaskan bahwa pendidikan politik mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan dimensi substantif demokrasi yang sering terabaikan. Lebih jauh, ketika pemateri menguraikan mekanisme pemilu dan urgensinya sebagai sarana legitimasi pemerintahan, muncul sejumlah pertanyaan dari nelayan, misalnya tentang praktik politik uang yang kerap mereka alami serta pengalaman langsung terkait mobilisasi massa menjelang pemilu. Respon kritis ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman awal masyarakat masih terbatas, terdapat kesadaran empiris yang kuat tentang dinamika pemilu, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat menjadi titik awal untuk memperdalam literasi politik mereka (Surbakti, 1999).



**Gambar 2. Materi 1 “Demokrasi dan Pemilu”**

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat nelayan di Kelurahan Rawa Makmur mengenai pemilu sebagai instrumen demokrasi pada awalnya masih terbatas pada aktivitas memilih calon, tanpa memandangnya sebagai sarana legitimasi politik yang menentukan arah kebijakan publik. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh berbagai hambatan, seperti kesulitan akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) akibat lokasi yang jauh dari permukiman pesisir, persoalan administrasi kependudukan yang belum tertib, serta minimnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu di tingkat lokal. Hambatan serupa juga ditemukan dalam studi Andyanto (2023) yang menyebutkan bahwa kelompok marjinal seringkali menghadapi kendala struktural dalam menyalurkan hak pilihnya. Namun, setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini, peserta mulai menyadari pentingnya pemilu sebagai mekanisme untuk menegakkan kedaulatan rakyat sekaligus wadah memperjuangkan kepentingan komunitas mereka. Kesadaran baru yang muncul, antara lain pemahaman bahwa setiap suara individu memiliki kontribusi signifikan terhadap hasil pemilu, serta peran masyarakat dalam menentukan arah pembangunan yang lebih berpihak pada kelompok nelayan. Hal ini sejalan dengan pandangan Surbakti (1999) bahwa pemilu tidak hanya prosedur teknis, tetapi juga sarana partisipasi politik substantif yang memperkuat legitimasi demokrasi.

Secara struktural, partisipasi politik masyarakat nelayan sering kali berbeda dari rata-rata partisipasi masyarakat perkotaan. Hal ini berkaitan dengan karakteristik pekerjaan nelayan yang memiliki pola waktu kerja tidak tetap dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, musim penangkapan ikan, serta pasang surut air laut atau sungai. Dalam beberapa kasus, aktivitas melaut dapat berlangsung sejak dini hari hingga sore hari, sehingga berpotensi berbenturan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kondisi ini menyebabkan sebagian nelayan menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan ekonomi harian dan menggunakan hak pilih mereka.

Selain itu, faktor mobilitas dan lokasi permukiman juga memengaruhi tingkat partisipasi politik nelayan. Permukiman pesisir seringkali berada di wilayah yang relatif jauh dari pusat administrasi atau fasilitas publik, termasuk TPS, sehingga akses fisik menjadi salah satu kendala penting. Penelitian mengenai partisipasi politik kelompok marjinal menunjukkan bahwa keterbatasan akses layanan publik dan infrastruktur dapat menurunkan tingkat keterlibatan politik masyarakat. Dalam konteks masyarakat nelayan Rawa Makmur, kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan informasi politik yang membuat sebagian warga tidak sepenuhnya memahami urgensi partisipasi dalam pemilu sebagai sarana memperjuangkan kepentingan komunitas mereka.

Pasca kegiatan penyuluhan, terlihat adanya perubahan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai demokrasi dan partisipasi politik. Jika sebelumnya demokrasi dipersempit hanya pada proses pemilu, setelah mengikuti kegiatan ini peserta mulai menyadari bahwa demokrasi mencakup keterlibatan aktif dalam musyawarah pembangunan lokal, penyampaian aspirasi, serta kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Indikasi peningkatan literasi politik ini sejalan dengan temuan Wahyuningroem (2021), yang menunjukkan bahwa pendidikan politik mampu memperluas pemahaman masyarakat tentang dimensi substantif demokrasi, termasuk partisipasi non-elektoral. Dalam diskusi, sejumlah peserta mengungkapkan dorongan untuk lebih aktif menghadiri forum publik seperti musrenbang kelurahan, karena mereka menyadari bahwa keterlibatan tersebut merupakan bagian penting dari hak politik yang dapat memengaruhi arah pembangunan pesisir. Hal ini menegaskan pentingnya pendidikan politik inklusif sebagai sarana pemberdayaan komunitas marginal, yang pada gilirannya dapat memperkuat demokrasi lokal yang partisipatif dan berkeadilan sosial.



**Gambar 3. Peserta Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat Pesisir**



**Gambar 4. Pembukaan Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat Pesisir**

Analisis kritis terhadap hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman demokrasi masyarakat nelayan di Kelurahan Rawa Makmur memiliki relevansi dengan temuan penelitian di wilayah pesisir lain. Misalnya, studi oleh Andyanto (2023) di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan bahwa masyarakat nelayan cenderung memahami demokrasi secara prosedural, sehingga membutuhkan intervensi pendidikan politik untuk memperkuat partisipasi substantif mereka.



**Gambar 5. Pembagian Pre-Test dan Post-Test**

Berdasarkan hasil pre-test, mayoritas peserta sudah memahami prinsip dasar demokrasi dan pemilu, meskipun masih ada sebagian kecil yang keliru. Sebanyak 47 dari 50 peserta menjawab benar bahwa demokrasi menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, 48 peserta

memahami fungsi pemilu sebagai sarana memilih pemimpin dan wakil rakyat, serta 49 peserta mengetahui bahwa salah satu ciri demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Namun, pada pertanyaan tentang syarat sahnya pemilu, hanya 45 peserta yang menjawab benar, sementara 5 peserta masih beranggapan cukup dengan persetujuan pemerintah. Begitu pula pada periode pemilu, 49 peserta menjawab lima tahun sekali, dan 1 peserta masih keliru. Hasil ini menunjukkan perlunya edukasi politik lebih lanjut, terutama terkait keabsahan pemilu dan prinsip demokrasi.

Hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta secara signifikan. Seluruh peserta (50 orang) menjawab benar fungsi pemilu dan prinsip utama demokrasi, sementara 49 orang memahami ciri demokrasi sebagai kebebasan berpendapat, syarat sah pemilu yang jujur dan adil, serta periode pemilu lima tahunan. Dibandingkan pre-test, hampir seluruh peserta konsisten menjawab benar, menegaskan efektivitas metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok dalam meningkatkan literasi politik komunitas nelayan. Perbandingan pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan. Jika sebelumnya masih ada peserta yang keliru memahami prinsip demokrasi, fungsi, dan syarat sah pemilu, setelah pelatihan hampir seluruhnya menjawab benar. Seluruh peserta (100%) memahami fungsi pemilu dan prinsip demokrasi, sementara 49 dari 50 peserta memahami ciri demokrasi, syarat sah pemilu, serta periode pemilu lima tahunan. Hal ini membuktikan efektivitas sosialisasi dan pelatihan partisipatif dalam meningkatkan literasi politik komunitas nelayan.

Hasil kegiatan ini menegaskan pola serupa, meskipun terdapat indikasi positif berupa meningkatnya kesadaran politik pasca penyuluhan. Namun, tantangan yang tersisa tetap nyata, seperti sikap apatis sebagian kecil peserta yang masih menganggap politik sebagai ranah elit, serta keterbatasan akses informasi politik akibat minimnya fasilitas literasi dan media di kawasan pesisir (Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), 2023). Oleh karena itu, pendidikan politik inklusif menjadi strategi penting untuk menanggulangi hambatan tersebut, karena mampu menghubungkan hak-hak politik warga negara dengan pengalaman riil masyarakat marginal. Hal ini sekaligus memperkuat argumen bahwa demokrasi hanya dapat berkembang secara substantif apabila seluruh kelompok sosial, termasuk komunitas nelayan, dilibatkan dalam proses pendidikan politik yang berkelanjutan.

Hasil diskusi dengan peserta kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya literasi politik masyarakat nelayan tidak hanya disebabkan oleh faktor individual, tetapi juga oleh kombinasi hambatan struktural dan kultural. Hambatan struktural berkaitan dengan faktor institusional dan administratif yang memengaruhi akses masyarakat terhadap proses politik. Beberapa hambatan yang diidentifikasi antara lain keterbatasan akses terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS), persoalan administrasi kependudukan seperti belum terbarunya data pemilih, serta minimnya sosialisasi pemilu di kawasan pesisir. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi informasi dan layanan demokrasi antara wilayah pusat kota dan kawasan pinggiran seperti komunitas nelayan.

Di sisi lain, hambatan kultural berkaitan dengan persepsi dan sikap masyarakat terhadap politik. Sebagian nelayan masih memandang politik sebagai urusan elit atau aktor pemerintahan, sehingga mereka merasa memiliki keterbatasan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Persepsi ini diperkuat oleh pengalaman masa lalu yang menunjukkan bahwa aspirasi komunitas nelayan tidak selalu menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah. Akibatnya, muncul kecenderungan sikap apatis atau pragmatis terhadap pemilu, misalnya hanya berpartisipasi ketika terdapat insentif tertentu atau mobilisasi dari aktor politik lokal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Almond dan Verba (1963) yang menekankan bahwa budaya politik masyarakat sangat memengaruhi tingkat partisipasi dalam sistem demokrasi.

Diskusi kelompok yang dilakukan selama kegiatan penyuluhan juga mengungkap sejumlah pengalaman konkret yang disampaikan oleh peserta. Beberapa nelayan mengungkapkan bahwa pada pemilu sebelumnya mereka menghadapi kesulitan untuk datang ke TPS karena lokasi TPS berada cukup jauh dari permukiman mereka di kawasan pesisir. Selain itu, terdapat pula pengalaman terkait keterbatasan informasi mengenai jadwal dan prosedur pemungutan suara, sehingga sebagian warga baru mengetahui informasi tersebut melalui jaringan informal seperti tetangga atau keluarga.

Pengalaman lain yang muncul dalam diskusi adalah praktik politik uang yang menurut beberapa peserta masih sering terjadi menjelang pemilu. Seorang peserta menyampaikan bahwa pada periode pemilu sebelumnya terdapat pihak tertentu yang mendatangi permukiman nelayan untuk menawarkan bantuan atau insentif dengan harapan memperoleh dukungan politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat nelayan berada pada posisi yang rentan terhadap praktik klientelisme politik, terutama ketika kondisi ekonomi mereka relatif terbatas. Diskusi ini memperlihatkan bahwa pengalaman empiris masyarakat pesisir terhadap dinamika politik lokal sebenarnya cukup kuat, meskipun belum selalu diikuti dengan pemahaman konseptual mengenai demokrasi dan partisipasi politik.

### **Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Literasi Politik Masyarakat Pesisir**

Berdasarkan temuan lapangan, peningkatan literasi politik masyarakat nelayan di Kelurahan Rawa Makmur memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan kontekstual. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Samarinda antara lain sebagai berikut.

Pertama, pemerintah daerah bersama penyelenggara pemilu perlu meningkatkan program pendidikan politik berbasis komunitas di wilayah pesisir. Program ini dapat dilakukan secara berkala melalui kerja sama dengan kelurahan, kelompok usaha bersama (KUB) nelayan, serta organisasi masyarakat lokal. Pendekatan berbasis komunitas terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman politik kelompok marginal karena materi dapat disampaikan dengan bahasa yang kontekstual dan relevan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat.

Kedua, diperlukan upaya untuk memperbaiki aksesibilitas layanan pemilu bagi masyarakat pesisir, misalnya melalui penempatan TPS yang lebih dekat dengan permukiman nelayan atau penyediaan mekanisme informasi yang lebih intensif terkait jadwal dan prosedur pemilu. Kebijakan ini penting untuk mengurangi hambatan struktural yang selama ini menghalangi masyarakat pesisir dalam menggunakan hak pilihnya.

Ketiga, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan program literasi demokrasi dengan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Integrasi ini penting karena kondisi ekonomi yang stabil dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik secara lebih aktif. Program pemberdayaan yang disertai dengan edukasi politik juga dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik politik uang dan klientelisme.

Keempat, pemerintah kota perlu memperkuat saluran partisipasi non-elektoral, seperti forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan dialog publik di tingkat kelurahan. Dengan memperluas ruang partisipasi ini, masyarakat nelayan dapat lebih terlibat dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, termasuk pembangunan infrastruktur pesisir dan pengelolaan sumber daya perikanan.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan ini menegaskan bahwa penguatan demokrasi lokal tidak hanya bergantung pada pelaksanaan pemilu secara prosedural, tetapi juga pada upaya sistematis untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat marginal, seperti komunitas nelayan, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan politik, informasi publik, dan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan.

## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur, Kota Samarinda, dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah interaktif, penyuluhan, dan diskusi partisipatif yang melibatkan 50 peserta dari lima kelompok nelayan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya interaksi dua arah, di mana peserta tidak hanya menerima materi dari pemateri mengenai demokrasi, pemilu, dan partisipasi politik, tetapi juga dapat menyampaikan pandangan serta pengalaman mereka terkait praktik demokrasi di tingkat lokal. Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun 2024 dan puncaknya dilakukan pada Jumat, 11 September 2025, berjalan efektif dengan suasana diskusi yang kondusif, ditandai oleh munculnya pertanyaan kritis dan pengungkapan isu-isu lokal seperti perlindungan nelayan dan pembangunan pesisir. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat pesisir bahwa demokrasi bukan hanya sebatas prosedur elektoral, melainkan juga mencakup keterlibatan aktif dalam forum musyawarah pembangunan dan pengawasan kebijakan publik. Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan pentingnya pendidikan politik inklusif sebagai instrumen untuk memperkuat partisipasi demokratis masyarakat nelayan, sekaligus membangun fondasi demokrasi lokal yang lebih substantif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Admin. (2024). *Pemkot Samarinda Salurkan Bantuan Sarana dan Prasaranan Penangkapan Ikan Kepada Kelompok Nelayan di Palaran*. jdih.samarindakota.go.id. <https://jdih.samarindakota.go.id/jdih/umum/pemkot-samarinda-salurkan-bantuan-sarana-dan-prasaranan-penangkapan-ikan-kepada-kelompok-nelayan-di-palaran?>
- Admin. (2025). *Kelurahan Rawa Makmur*. Samarindakota.go.id. <https://samarindakota.go.id/balai-kota/kelurahan/rawa-makmur?>
- Agustani, R. (2024). *Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Kaltim Menurun Drastis: Mahulu dan PPU Tertinggi; Samarinda dan Balikpapan Terendah*. kaltimpost.jawapos.com. <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/2385395931/tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-kaltim-menurun-drastis-mahulu-dan-ppu-tertinggi-samarinda-dan-balikpapan-terendah?>
- Andyanto, H., Samiruddin, Tandi, R., & Syahadat, M. I. (2023). Kendala Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir dalam Pemilihan Kepala Daerah. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 1(1), 29–37.
- Antaraneews. (2024). *Tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2024*. antaraneews.com. <https://www.antaraneews.com/infografik/4029990/tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-2024>
- Fahmi Widiyanto. (2024). Studi Demokrasi Lokal: Tinjauan Literatur Sistematis (SLR). *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 73–89. <https://doi.org/10.70214/d1verb18>
- Hasimu, H., & Amsir, A. A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan di Pulo Madu Kabupaten Kepulauan Selayar. *Vox Populi*, 2(2), 88. <https://doi.org/10.24252/vp.v2i2.11975>
- Mappakalu, M. (2015). Partisipasi Politik Masyarakat Memperkokoh Pelaksanaan Pilar Demokrasi. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 6(1), 33–42.
- Mulka, S. R., Pratama, M. A. A. P., Amalia, D. R., Hastira, M. F., & Damaianti, A. E. (2025). Pendidikan Politik Inklusif Bagi Komunitas Kampung Nelayan Maju Dalam Meningkatkan Partisipasi Demokratis Di Samarinda. *An-Nizam*, 4(2), 346–360. <https://doi.org/10.33558/an-nizam.v4i2.11656>
- Novriandi, A. (2023). *Kunjungan Tim Monev Kampung Nelayan Maju Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kota Samarinda*. diskansamarindakota.go.id. <https://diskansamarindakota.go.id/umum/kunjungan-tim-monev-kampung-nelayan-maju-kementerian-kelautan-dan-perikanan-di-kota-samarinda?>
- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). (2023). *Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Elektoral*.
- Surbakti, R. (1999). Memahami Ilmu Politik. In *Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta* (Nomor September).
- Wahyuningroem, S. L. (2021). Masyarakat Politik, Agregasi Kepentingan dan Penguatan Demokrasi di Indonesia: Studi Kasus Bali dan Maluku. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 236–251. <https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.236-251>
- Yusri, L. (2021). *Pendidikan Politik Dan Demokrasi*. <https://ajardemokrasi.com/pendidikan-politik-dan-demokrasi/>